

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- M. Munandar Soelaiman, 1995, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco*, Bandung.
- Sidi Gazalba, 1976, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ari H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soejono Soekamto, 1990, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- V.Wiratna Sujarweni. 2015, *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Yogyakarta.
- R.B. Bely Dj. Widodo dkk, 2015, “ *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*” Jakarta.
- Slamet, Y. 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Rohmad, Zaini 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Ombak, Yogyakarta.
- Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- Yuwono, Teguh, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Ciyapps Diponegoro Universiti, Semarang,
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta

Mikkelsen, Britha, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Ross, Murray G. and B.W. Lippin, 1967, *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition Harper & Row Publishers, New York

Jurnal:

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 1, No. 6, 2013.

Suci Indah Hanifah Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8, 2015.

Retno Murni Sari Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendaftaran Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi* Vol.7, No. 2, 2015.

Nuring Septyasa Laksana, Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, Vol. 1, NO. 1, 2013.

Anwar, Sakaria J., Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 6, 2012.

Isma Coryanata, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, 2012.

Made Heny Urmila Dewi, chafid fandeli, M. Baiquni, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, *Jurnal Kawistara*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Alwi Hasyim Batubara, Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 3, No. 1, 2006.

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Antono Herry P.A, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa), *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol 5, No 1, 2015.

Skripsi:

Panji Putra. 2018. Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah

Subroto, Agus, 2000, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Internet :

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-danaDesa.html> diunduh pada 25 Maret 2015, pukul 10:30 WIB.

<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.htm> diakses pada tanggal 27 Maret 2015, pukul 13:56

<https://alpha-i.or.id/2017/03/07/peran-masyarakat-dalam-pengelolaan-anggaran-desa/>, diakses pada 03 mei 2019, pukul 11:16

Dikutip dari petatematikindo “Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir” <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-indragiri-hilir/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 23.36

Dikutip dari portal resmi pemerintah INHIL “sistem informasi geografis sarana & prasarana” <https://www.inhilkab.go.id/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 23.59

Dikutip dari portal resmi pemerintah INHIL “sistem informasi geografis sarana & prasarana” <https://www.inhilkab.go.id/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 00.45